

Pengembangan *Financial Literacy Class* di Sekolah Dasar: Sebagai Pencegahan Korupsi Sejak Dini di Indonesia

Felisa Dwi Mubarika¹, Syilvia Dwi Ifani², Wijati³ Lisah⁴ Hasan Argadinata⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Negeri Malang

¹²³⁴⁵ Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

*Corresponding author, email: hasan_argadinata.fip@um.ac.id

Kata Kunci

Korupsi
Aplikasi
Pendidikan
Peserta Didik
Sekolah Dasar

Abstrak

Korupsi telah merambat secara luas di Indonesia, sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah dijajah oleh korupsi. Adapun tujuan dari penyusunan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan, pengetahuan yang baru kepada pembaca agar lebih bijak dalam mengelola kecanggihan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Aplikasi Financial Literacy Class hadir sebagai solusi memecahkan masalah yang terjadi di sekolah dasar dalam mengelola uang kas. Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus tunggal dan pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti dapat memperoleh sejumlah data yang akan menjadi informasi sebagai bahan utama sekaligus topik dari isi artikel. Aplikasi Financial Literacy Class dapat meminimalisir kebiasaan kecil penyebab kasus korupsi di Indonesia, karena mengajarkan peserta didik untuk mengelola keuangan kelas dan dipergunakan sebaik-baiknya. Sejatinya, kasus korupsi tidak memandang usia dan dapat terjadi oleh siapa saja.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dapat diartikan dengan sebuah usaha untuk mencapai tujuan dan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Menurut Kadi & Awwaliyah (2017) Pendidikan diartikan sebagai sebuah pengembangan diri yang intelektual dan berfokus pada peserta didik, oleh karena itu peserta didik diharapkan mampu memiliki kesiapan mental dan dapat mengelola kemampuan teoritik yang dimiliki oleh peserta didik. Menjalankan kehidupan yang sejatinya selalu berubah-ubah dan mengikuti modernisasi suatu bangsa, pendidikan dijadikan sebagai sebuah wadah penting dan menjadi media yang efektif untuk mengajarkan begitu banyak hal pada peserta didik yang termasuk generasi muda masa kini. Mulai dari norma, membangun dan memupuk kepribadian bangsa, mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, mengembangkan diri dalam menambah pengalaman dan etos kerja, cinta tanah air. Banyak lembaga pendidikan yang ingin menciptakan kualitas peserta didik menuju lebih baik untuk menyambut masa depan yang gemilang di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan sebuah penelitian Ismail, dkk (2021) mengenai kebijakan penguatan pendidikan karakter, yaitu kondisi dunia pendidikan di Indonesia telah banyak melahirkan lulusan manusia dengan tingkat intelektual yang memadai. Dengan kriteria peserta didik yang memiliki nilai pengetahuan yang tinggi, mampu menerapkan *problem solving* dengan baik, kreativitas yang terus diasah dan ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan dinilai brilian dalam berpendapat atau mengutarakan pendapat. Selaras dengan paparan tersebut, menurut Argadinata & Gunawan (2019) memaparkan bahwa setiap individu perlu memiliki karakter yang kuat. Cara peserta didik menanggapi fenomena sosial yang terjadi akan membentuk dan mencerminkan karakter mereka. Tetapi, pengembangan karakter bagi peserta didik saja tidak akan lengkap jika peserta didik hanya fokus untuk meningkatkan kualitas karakter dan pengetahuannya, tetapi peserta didik juga harus dapat dibuka mata dan pikirannya terkait dengan kondisi di negara Indonesia. Karena, peserta didik di masa yang sekarang akan menjadi seorang pemimpin bagi negara Indonesia di masa yang akan datang.

Terdapat begitu banyak hal yang berhubungan dengan kondisi di Indonesia saat ini, salah satunya adalah sebuah permasalahan terkait korupsi. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama. Dengan menggunakan berbagai cara, mulai dari hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetapi pada kenyataannya dalam penelitian Ferico, dkk (2020) tentang peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia sering kali

mengalami jalan buntu. Adapun penyebabnya adalah korupsi tidak hanya terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pelakunya pun tidak memandang muda atau usia tua tetapi dengan tega mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Korupsi kerap kali terjadi pada masyarakat Indonesia yang bermula dari sifat tamak dan rakus, memiliki kesan ingin mengambil segalanya. Implementasi kecilnya adalah dimana individu yang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah puas terhadap apa yang dimilikinya. Sejatinya, menurut Yusmiati (2020) sejarah korupsi di Indonesia telah terjadi sejak zaman hindia belanda, akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat Indonesia telah menjadi kejahatan yang tidak akan ada habisnya atau biasa disebut dengan "kejahatan kerah putih" karena dapat mengundang perhatian masyarakat, pelakunya pun adalah orang-orang yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai orang-orang yang cukup terpuji namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat. Berdasarkan dengan hal tersebut, pemberantasan korupsi di negara Indonesia tercinta bukan hanya persoalan penegakan hukum semata, melainkan juga merupakan persoalan psikologi dan sosial.

Terciptanya kasus korupsi di Indonesia menimbulkan banyak perdebatan, masyarakat berasumsi bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti sebuah kebiasaan yang dengan mudahnya dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, entah itu dari kalangan atas dan kalangan ke bawah. Menurut Priambodo, dkk (2020) permasalahan korupsi di Indonesia sulit diberantas karena adanya tinjauan dari sisi historisnya dimana para penjajah dan pendahulu sudah menunjukkan dan bahkan mengajarkan masyarakat Indonesia ke perilaku koruptif. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia selalu hidup berdampingan dengan kebiasaan korupsi. Perilaku tidak terpuji ini, telah merambat kemana-mana dan salah satu yang peneliti amati adalah di dalam dunia pendidikan. Sebagai salah satu seorang masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, tentunya peneliti tidak dapat menutup mata jika ada sebuah kasus dan permasalahan baru yang dapat menghambat terciptanya kualitas pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tentunya dalam lingkup pendidikan, korupsi dapat diminimalisir dengan cara menerapkan pendidikan anti korupsi, seperti halnya menurut Salna, dkk (2023) salah satu upaya pencegahan korupsi di kalangan peserta didik adalah dengan mencanangkan program pendidikan anti korupsi. Sekolah sampai perguruan tinggi dapat mengambil peran yang strategis dalam menerapkan pendidikan anti korupsi, khususnya sekolah dasar. Mencegah korupsi melalui pendidikan antikorupsi di sekolah dasar (SD) sangatlah penting. Dari sudut pandang sosiologis, usia anak-anak antara 7 hingga 12 tahun adalah masa di mana pembentukan karakter mulai terjadi. Hal tersebut merupakan periode di mana mereka mulai belajar mengatur diri. Jika nilai-nilai anti korupsi ditanamkan sejak dini, maka nilai-nilai tersebut akan tertanam kuat hingga mereka dewasa (Nestariana & Ria, 2023). Harapannya adalah, agar peserta didik dapat membiasakan diri karena telah memiliki pandangan untuk menghindari korupsi di Indonesia. Pendidikan korupsi yang diterapkan di sekolah maupun di universitas, terkadang hanya sepintas saja dan membuat peserta didik lupa akan penyampaian yang telah diberikan selama pendidikan anti korupsi berlangsung.

Peneliti berasumsi bahwa, pendidikan anti korupsi yang telah dirancang dan diterapkan oleh beberapa sekolah di Indonesia khususnya di Kota Malang, Jawa Timur masih belum cukup untuk membiasakan diri peserta didik melakukan pencegahan korupsi sejak dini. Kondisi di lapangan menyatakan bahwa sekitar 70% siswa yang berada di Sekolah Dasar di Kecamatan Kedungkandang tepatnya SDN Madyopuro 3 telah menerapkan pendidikan anti korupsi, namun peserta didik masih mengabaikan dan masih sering kurang mendalami teori dari pendidikan korupsi. Sehingga peneliti, menciptakan sebuah aplikasi pengembangan yaitu *Financial Literacy Class*. Adapun tujuan aplikasi pengembangan ini adalah sebagai bentuk pembiasaan peserta didik dalam mengelola uang kas, pembiasaan yang dimulai sejak dini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan peserta didik. Menurut Astuti & Dewi (2021), Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan di Indonesia (IPTEK) merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dengan praktis dan efektif namun tepat dan menguntungkan bagi pendidik dan peserta didik. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik lebih bersemangat ketika belajar bersama dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Perkembangan IPTEK tidak hanya dapat mensejahterakan kehidupan sosial saja, tetapi pendidikan pun dapat disejahterakan dan dikembangkan melalui kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Oleh karena itu, peneliti memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan sebuah aplikasi yang mudah dipahami dalam penerapan pembiasaan pendidikan antikorupsi di sekolah.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus tunggal. Peneliti mengambil penelitian secara kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan juga analisis. Menurut Waruwu (2023) pada umumnya penelitian kualitatif digunakan sebagai penelitian untuk mengetahui dan menelusuri sebuah permasalahan secara mendalam dengan menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan secara menjabarkan makna dari suatu fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Penelitian dilaksanakan di SDN Madyopuro 3 yang berlokasi di Jalan Sentani Dalam XI/12 Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 3 termasuk salah satu sekolah dasar yang berdiri di tengah lingkungan masyarakat, dengan bangunan yang kokoh dan lingkungan yang asri serta hijau. Adapun kepala sekolah dari SDN Madyopuro 3 adalah Ibu Siti Khotimah, S.Pd., M.Pd beliau telah memberikan banyak informasi untuk memenuhi data penelitian terkait dengan pendidikan korupsi yang diterapkan. Adapun sasaran dalam penelitian ini yaitu Ibu Kepala Sekolah, Guru Wali Kelas, Peserta didik, dan Orang tua Peserta Didik. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan 2 teknik yaitu secara wawancara dan observasi. Peneliti memilih 2 teknik tersebut, dikarenakan dalam pendidikan korupsi yang dilakukan oleh SDN Madyopuro 3 kebanyakan dalam kegiatan sosialisasi sehingga tidak terdapat dokumentasi yang spesifik.

2.1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan memperoleh data dengan bertanya kepada informan, *output* dari wawancara ini adalah sebuah rekaman suara. Dengan bahasa lain, wawancara merupakan sebuah percakapan antara orang dan orang, yang dimana salah satunya berperan sebagai informan dan penanya (peneliti). Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung, terbuka, dan *holistic* dari orang yang menjadi informan. Wawancara dilaksanakan di ruang guru bersama dengan kepala sekolah yaitu Ibu Siti Khotimah, S.Pd., M.Pd dan Ibu Pudji Rahayu, S.Pd pada saat jam istirahat mata pelajaran pertama. Kedua informan tersebut memberikan informasi penting dan terperinci mengenai pendidikan anti korupsi, dan antusiasme peserta didik SDN Madyopuro 3 dalam belajar dengan perkembangan IPTEK yang semakin canggih. Wawancara dilaksanakan berdasarkan dengan 2 teknik ada yang jenisnya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Selama penelitian berlangsung, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, tujuannya agar penyampaian informasi dapat tersampaikan dengan jelas untuk kemudahan peneliti memasukkan serangkaian informasi tersebut ke dalam artikel. Wawancara tidak terstruktur dapat digunakan oleh peneliti, ketika informan dan peneliti berada di luar kelas dan berbincang-bincang bersama.

Wawancara lebih banyak digunakan oleh peneliti dikarenakan wawancara dapat memberikan segudang informasi bagi peneliti, dengan memanfaatkan waktu informan ketika jam istirahat peneliti dan guru dapat melakukan wawancara secara lebih intens terkait dengan kebiasaan peserta didik dalam mengelola keuangan, pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan dan sosialisasi yang pernah dijalankan oleh Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 3. Wawancara dilaksanakan dengan bantuan catatan dan perekam suara melalui telepon genggam yang dimiliki oleh peneliti, kemudian hasil rekaman tersebut dituangkan dalam transkrip wawancara. Berikut adalah catatan yang menjadi transkrip wawancara dari penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 3.

2.2. Observasi

Observasi biasa dikenal dengan pengamatan, merupakan sebuah kegiatan mendapatkan sebuah data melalui sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Observasi atau pengamatan sejatinya merupakan sebuah kegiatan mengamati benda, lingkungan, dan gerak dan juga proses. Teknik pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung dengan memuat pengamatan sebagai berikut: (1) lingkungan fisik yang mencakup apa objeknya, sumber, dan teknologi, (2) mengamati siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendidikan anti-korupsi, dan siapa saja yang membantu peneliti untuk mengelola informasi, (3) mengamati interaksi antar kepala sekolah dan guru selama proses wawancara dan observasi berlangsung, (4) mengamati bobot bahasa yang digunakan selama kegiatan wawancara dan memberikan informasi kepada peneliti, (5) mengamati hal-hal kecil yang terlihat sepele namun bermakna seperti raut wajah, mimik dan gerakan badan, komunikasi non verbal.

2.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode yang perlu digunakan dalam sebuah penelitian terutama saat melibatkan sebuah sekolah sebagai objek penelitian. Metode dokumentasi sendiri menurut Chadijah (2023) merupakan proses ataupun cara pengumpulan informasi maupun data-data yang dibutuhkan melalui arsip maupun dokumen-dokumen. Karena metode dokumentasi sendiri dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang keadaan objek yang sedang diteliti maka data-data maupun arsip yang peneliti perlukan yaitu seperti, interaksi yang terjadi antara kepala sekolah dengan guru saat proses wawancara berlangsung, sumber atau rujukan atau hukum yang dijadikan patokan tentang pendidikan anti korupsi di Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 3, dan proses pengembangan materi atau kurikulum yang ada di sekolah mengenai pendidikan anti korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

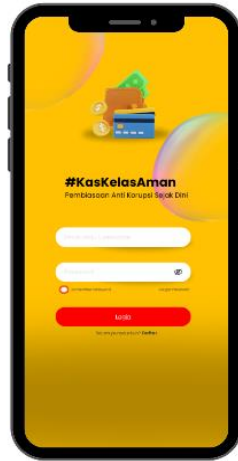
3.1. Hasil

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan kepala sekolah dan guru wali kelas SDN Madyopuro 3 adalah, dengan dilaksanakannya sebuah pendidikan anti korupsi maka akan meminimalisir terjadinya tingkat kasus korupsi di Indonesia. Peneliti mengungkapkan hasil lapangan yang sebenarnya terjadi adalah banyak peserta didik khususnya di kelas 4 yang masih sulit dalam mengelola uang kas. Usia sekolah dasar memang masih merupakan usia pergantian anak-anak menuju remaja, sehingga banyak peserta didik yang kadang kala belum memahami apa tindakan yang mereka lakukan, dan apa akibat dari tindakan tersebut.

Peserta didik dalam mengelola uang kas. Uang kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang dikumpulkan oleh masing-masing peserta didik di dalam kelas, yang nantinya akan digunakan membeli keperluan bersama. Tentunya jumlah uang kas akan dibatasi sesuai dengan ketetapan bersama. Salah satu peserta didik akan diberikan kepercayaan untuk mengelola uang kas yang disebut dengan bendahara kelas. Di SDN Madyopuro setiap bendahara yang ada di jenjang kelas 4 sampai 6 akan didampingi oleh guru wali kelas, tujuannya adalah untuk mengawasi dan memperhatikan sejauh mana pemahaman peserta didik dalam mengelola uang kas. Belajar mengelola uang pada anak usia sekolah dasar sangat penting untuk diajarkan sedari dini, sebagai persiapan peserta didik untuk persiapan masa depan yang akan datang.

Berdasarkan dengan hal tersebut, seperti yang telah diketahui bersama mengelola keuangan di usia dewasa akan sangat dibutuhkan karena pada usia tersebut yang akan menjadi segalanya. Uang menjadi penentu dalam segala kegiatan dan aktivitas, yaitu sebagai berikut: (1) Memenuhi kebutuhan dasar, yang digunakan untuk membeli kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal; (2) Kenyamanan dan kemudahan, uang memungkinkan akses ke teknologi dan fasilitas yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari; (3) Kesejahteraan mental dan emosional, kesejahteraan finansial dapat mengurangi stres dan kekhawatiran terkait dengan keamanan ekonomi, berkontribusi pada kesejahteraan mental; (4) Otonomi pribadi, kemandirian finansial memberikan otonomi dan kontrol lebih besar atas kehidupan sehari-hari dan keputusan pribadi.

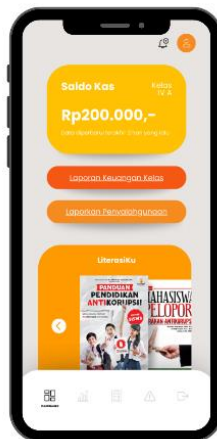
Berdasarkan dengan pernyataan tersebut, maka perilaku sederhana yang telah dilakukan dan dibiasakan sejak kecil tentu akan berdampak besar. Peneliti merancang sebuah aplikasi *financial literacy class* untuk bahan belajar peserta didik dalam mengelola uang kas. Adapun tampilan dari aplikasi ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Login Page Aplikasi

Sumber: Dokumen Peneliti (2024).

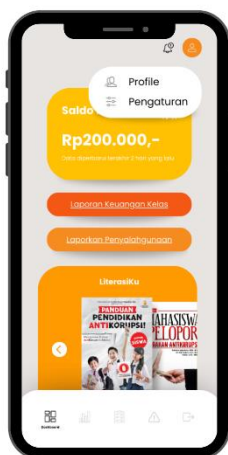
Gambar 1. memperlihatkan tampilan halaman *login* adalah komponen paling penting dari banyak aplikasi dan situs web yang memerlukan otentikasi pengguna. Fitur-fitur kunci yang biasanya ditemukan dalam halaman login meliputi: (1) *Username*, ini adalah kolom input di mana pengguna diminta untuk memasukkan nama pengguna atau alamat e-mail yang terkait dengan akun mereka. Informasi ini kemudian akan digunakan untuk mengidentifikasi pengguna saat mereka mencoba untuk login; (2) *Password*, ini adalah kolom input yang digunakan untuk memasukkan kata sandi yang terkait dengan akun pengguna. Karakter yang dimasukkan biasanya disembunyikan atau digantikan oleh simbol seperti bintang atau titik untuk keamanan; (3) *Remember Password*, opsi ini biasanya merupakan kotak centang yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi login mereka untuk login disimpan di perangkat pengguna, sehingga pengguna tidak perlu memasukkan kredensial login setiap kali mengunjungi halaman login. (4) *Forgot Password*, fitur ini biasanya berupa tautan atau tombol yang memungkinkan pengguna mengatur ulang kata sandi pengguna jika adanya kemungkinan lupa; (5) Halaman *login*, ini dirancang untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan akun pengguna. Komunikasi antara halaman *login* dan *server* biasanya dienkripsi untuk melindungi informasi *login* yang dikirimkan.



Gambar 2. Dashboard Aplikasi

Sumber: Dokumen Peneliti (2024).

Gambar 2. Memperlihatkan tampilan halaman pertama *user* masuk ke dalam aplikasi ini adalah *dashboard* atau halaman utama yang berisi menu notifikasi, info saldo terkini, tombol pintasan ke laporan keuangan kelas, tombol pintasan ke laporkan penyalahgunaan, dan terakhir ada menu buku digital atau artikel literasi mengenai pendidikan anti korupsi. Adapun fungsi masing-masing menu di atas adalah: (1) Notifikasi, memberikan informasi terkini mengenai penambahan atau pengurangan jumlah kelas, dan update pelaporan apabila melakukan laporan penyalahgunaan; (2) Info Saldo Kas, menampilkan saldo terakhir yang dimiliki kelas yang datanya diambil dari input transaksi keuangan oleh bendahara kelas di tab menu transaksi. Data berubah sesuai waktu terakhir pembaruan data oleh bendahara kelas; (3) *Shortcut* Laporan Keuangan Kelas, sebuah tombol pintasan untuk mengakses tab menu transaksi; (4) *Shortcut* Laporan Penyalahgunaan, sebuah tombol pintasan untuk mengakses tab menu laporkan; (5) Literasiku, menjadi perpustakaan mini digital berisi ebook atau artikel literasi mengenai pendidikan anti korupsi untuk menanamkan pembiasaan sikap anti korupsi sejak dini.



Gambar 3. Menu Profile Aplikasi

Sumber: Dokumen Peneliti (2024).

Gambar 3. Memperlihatkan tampilan menu *profile* berisi informasi tentang pengguna yang terkait dengan akun atau profil pengguna dalam aplikasi. Fungsi umum dari menu profile adalah berupa informasi pengguna. Pengguna dapat melihat dan mengedit informasi pribadi mereka, seperti nama, foto, profil, alamat email, nomor telepon, NIS, dan kelas. Menu profile adalah tempat dimana pengguna dapat mengelola dan memperbarui informasi ini.

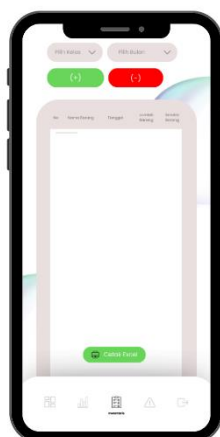
Menu pengaturan, atau menu *settings*, adalah fitur penting dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola preferensi dan pengaturan aplikasi secara keseluruhan. Melalui menu ini, pengguna dapat melakukan berbagai penyesuaian terkait akun mereka, termasuk mengubah kata sandi, menghubungkan akun ke platform media sosial lain, serta mengelola izin akses aplikasi. Selain itu, menu settings juga menyediakan opsi untuk menghapus akun jika diperlukan. Dengan demikian, menu ini berfungsi sebagai pusat kontrol yang memudahkan pengguna dalam menyesuaikan pengalaman mereka dan mengelola keamanan serta privasi akun secara efektif.



Gambar 4. Tampilan Tab Menu Transaksi

Sumber: Dokumen Peneliti (2024).

Gambar 4. memperlihatkan tampilan menu transaksi adalah menu utama dalam aplikasi ini, dimana bendahara kelas dapat menginput data pemasukan dan pengeluaran kas kelas. Dalam menu ini terdapat filter pilih kelas dan pilih bulan agar memudahkan pencarian data transaksi. Terdapat tombol pemasukan dan pengeluaran untuk memasukan data. Tombol cetak *excel* juga keunggulan dari aplikasi ini yang dimana laporan transaksi ini dapat dicetak langsung dengan format file excel. Tabel laporan keuangan terdiri dari nomor, tanggal, keterangan, debet, kredit, dan saldo.



Gambar 5. Tampilan Tab Menu Inventaris

Sumber: Dokumen Peneliti (2024).

Gambar 5. memperlihatkan tampilan menu inventaris adalah menu tambahan dalam aplikasi ini, dimana bendahara kelas dapat memasukkan barang-barang yang menjadi inventaris kelas seperti meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Dalam menu ini terdapat filter pilih kelas dan pilih bulan agar memudahkan pencarian data inventaris. Terdapat tombol penambahan dan pengurangan untuk mengelola inventaris kelas. Tombol cetak *excel* juga keunggulan dari aplikasi ini yang dimana laporan inventaris kelas ini dapat dicetak langsung dengan format file excel. Tabel laporan inventaris terdiri dari nomor, nama barang, tanggal, jumlah barang, dan kondisi barang.



Gambar 6. Tampilan Tab Laporkan

Sumber: Dokumen Peneliti (2024).

Gambar 6. memperlihatkan tampilan keunggulan aplikasi ini terdapat fitur laporkan penyalahgunaan apabila diduga bendahara kelas menyalahgunakan kas kelas. Terdapat kolom komentar berupa gelembung chat sehingga lebih interaktif dan aman. Identitas orang yang melaporkan dijamin kerahasiaannya sehingga tidak terintimidasi oleh pihak manapun. Fase pelaporan terdiri dari laporan, upload bukti, validasi oleh pihak sekolah, dan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.



Gambar 7. Tampilan Tab Logout

Sumber: Dokumen Peneliti (2024).

Gambar 7. memperlihatkan tampilan fungsi *logout* dalam aplikasi adalah untuk mengakhiri sesi atau akses pengguna ke akun mereka dan keluar dari aplikasi. Fungsi utama dari *logout* dalam aplikasi (1) Keamanan Akun, *logout* membantu menjaga keamanan akun pengguna. Dengan melakukan *logout* setelah selesai menggunakan aplikasi, pengguna memastikan bahwa tidak ada akses yang tidak sah ke akun mereka dari perangkat yang sama. Ini melindungi informasi pribadi dan mengurangi risiko akses yang tidak diinginkan; (2) Privasi pengguna: *logout* juga berhubungan dengan privasi pengguna. Dengan keluar aplikasi, pengguna memastikan bahwa data mereka tidak lagi terhubung atau dapat diakses oleh orang lain yang menggunakan perangkat yang sama. Ini terutama penting ketika pengguna berbagi perangkat dengan orang lain atau menggunakan perangkat umum.

Logout adalah langkah penting dalam menjaga keamanan dan privasi pengguna dalam aplikasi. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk menggunakan fungsi logout saat mereka selesai menggunakan aplikasi atau saat mereka meninggalkan perangkat yang digunakan bersama dengan orang lain.

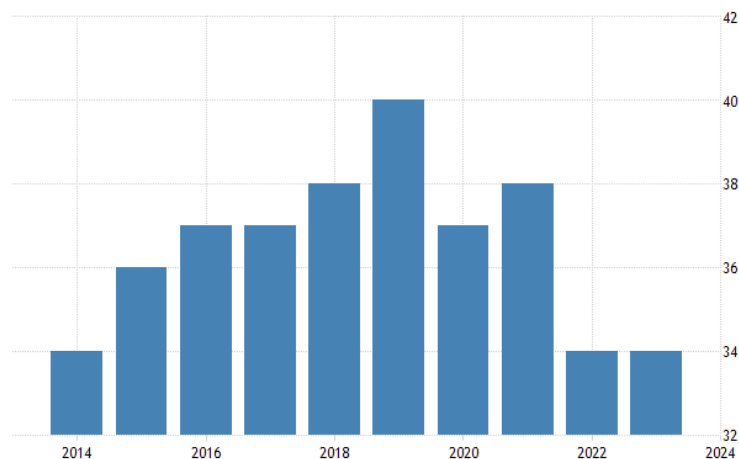
Aplikasi *Financial Literacy Class* menjadi salah satu hasil yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang terjadi. Dengan harapan bahwa, dengan terciptanya aplikasi tersebut dapat meminimalisir sikap buruk peserta didik untuk tidak melestarikan budaya korupsi sejak dini. Aplikasi tersebut berfungsi untuk membantu peserta didik dalam mengelola uang kas kelas yang telah menjadi kebiasaan dari peserta didik di SDN Madyopuro khususnya pada jenjang kelas 4 sampai kelas 6. Pemecahan masalah yang ditawarkan memanfaatkan perkembangan digital yang kian canggih.

3.2. Pembahasan

Korupsi di negara Indonesia telah menjadi masalah yang signifikan di Indonesia selama bertahun-tahun. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk mengatasi korupsi melalui berbagai upaya hukum dan penegakkan hukum, korupsi masih tersebar luas di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor masyarakat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan korupsi, diantaranya adalah budaya nepotisme, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara Indonesia tidak dapat dituntaskan begitu saja, menurut penelitian (Agus, 2020) baik itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjadi bagian yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada hakikatnya tindakan buruk tersebut muncul karena lemahnya integritas dari seorang individu. Budaya nepotisme tentunya perlu dihilangkan dan diberantas kan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya nepotisme di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menghambat mobilitas sosial, menurunkan moral dan produktivitas kerja, serta menciptakan ketidakadilan. Meskipun sebagian orang mungkin melihatnya sebagai cara untuk memperkuat jaringan dan mendukung keluarga, banyak pula yang menganggapnya sebagai praktik yang merugikan dan perlu diperbaiki untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan meritokrasi. Upaya untuk mengatasi nepotisme seringkali melibatkan reformasi kebijakan, peningkatan transparansi, dan promosi sistem yang berbasis pada prestasi dan kompetensi.

Rendahnya gaji pun dapat mempengaruhi tindak korupsi di Indonesia. Hal tersebut diperkuat oleh gagasan Menurut (Jermias, 2016) gaji memiliki pengertian bahwa sebuah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi dan pemberian motivasi atas usaha kerja yang telah dilaksanakan dan dikerjakan oleh karyawan. Ketika masyarakat Indonesia telah termakan budaya konsumtif sehingga terciptanya sikap tamak dan tidak pernah puas maka tidak dapat menutup kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia yang mempunyai gaji lebih rendah dapat melakukan tindakan yang buruk tersebut. penyebab lainnya adalah kurangnya transparansi. Transparansi merupakan pengelolaan keuangan yang tidak dirahasiakan dan dilakukan secara terbuka sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dalam penelitian (Mutia Basri et al., 2020) transparansi dilakukan agar terciptanya kesejahteraan dalam hidup masyarakat, tujuannya agar masyarakat dapat saling terbuka dan mengetahui pengelolaan uang tersebut akan digunakan untuk apa. Lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak transparan dan kurang akuntabel dapat menyebabkan pengawasan yang buruk terhadap proses hukum. Kurangnya transparansi dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi dapat menimbulkan peluang bagi praktik suap, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan uraian tersebut, tidak dapat dipungkiri lemahnya hukum yang ada di Indonesia dapat menjadi salah satu pemicu, korupsi masih menjajah sebagian masyarakat di Indonesia karena tidak adanya penegakan hukum yang tegas. Sehingga masyarakat yang berbuat kesalahan hanya akan menggampangkan sesuatu yang telah diperbuatnya. Lemahnya penegakan hukum seringkali terkait dengan budaya korupsi yang sudah mengakar di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor publik. Ketika budaya ini diterima atau bahkan dianggap sebagai norma, sulit untuk mengubah perilaku korupsi tanpa adanya reformasi hukum yang serius. Seharusnya, Indonesia berusaha untuk meningkatkan ekonomi dan industrialisasi. Kedua konsep tersebut seringkali saling terkait dan berdampak satu sama lain. Industrialisasi sering kali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, karena meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkembang juga dapat mendukung proses industrialisasi dengan menyediakan pasar yang stabil dan dana untuk investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Ketika kondisi ekonomi mulai mengalami peningkatan maka kondisi masyarakat haru disesuaikan pula.



Gambar 8. Tingkat Korupsi di Indonesia

Sumber: Trending Economics.com (2024).

Gambar 8. Menampilkan tingkat korupsi di tahun 2014-2024 mengalami naik dan turun, di tahun 2024 tingkat korupsi belum nampak, tetapi tahun yang paling parah adalah di tahun 2019. Korupsi tentu tidak memandang siapapun pelakunya, hal sekecil apapun dapat menjadi penyebab korupsi menjadi sebuah kebiasaan. Di lembaga pendidikan sendiri terdapat beberapa implementasi dari tindakan korupsi yang dapat terjadi. Gagasan tersebut diperkuat menurut Rahmawati & Sari (2023) yaitu a) penyalahgunaan dana sekolah, yang terjadi ketika dana yang dialokasikan sebagai keperluan sekolah seperti pembelian buku, peralatan, atau renovasi bangunan, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Penyalahgunaan dana sekolah merupakan masalah serius yang dapat merusak integritas sistem pendidikan dan menghambat kemajuan pendidikan itu sendiri. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas, mendukung kegiatan pembelajaran, dan membantu siswa dalam kebutuhan mereka, malah disalahgunakan atau diselewengkan, dampaknya sangat luas. Tidak hanya merugikan siswa dan tenaga pendidik, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Penyalahgunaan dana ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelapan anggaran, penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi pendidikan untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan mekanisme pelaporan yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus penyalahgunaan dana secara cepat dan adil. Dengan langkah-langkah preventif ini, kita dapat memastikan bahwa dana sekolah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa, b) suap dan pungutan liar, yang terjadi ketika pihak-pihak di lembaga pendidikan menerima suap atau melakukan pungutan liar dalam proses penerimaan beasiswa baru, penerimaan guru, atau dalam proses administrasi lainnya. Suap dan pungutan liar merupakan fenomena yang sangat merugikan dan merusak sistem pemerintahan serta sektor publik lainnya. Ketika pejabat atau pihak berwenang menerima suap atau melakukan pungutan liar, mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat yang telah memberikan tanggung jawab kepada mereka. Suap seringkali mempengaruhi keputusan yang seharusnya diambil secara adil dan objektif, sedangkan pungutan liar membebani masyarakat dengan biaya tambahan yang tidak sah dan tidak transparan. Kedua praktik ini merusak integritas sistem pelayanan publik dan menciptakan ketidakadilan yang memperburuk ketimpangan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan, menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggar, serta mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan tindakan korupsi. Dengan upaya bersama untuk memberantas suap dan pungutan liar, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan efisien bagi seluruh masyarakat, dan c) penjualan jabatan, yang terjadi ketika jabatan di lembaga pendidikan seperti kepala sekolah atau guru, dijual atau diperoleh melalui suap dan praktik nepotisme, bukan berdasarkan kualifikasi atau prestasi.

Tentunya hal tersebut merupakan praktik yang sangat merugikan integritas dan kualitas sistem pendidikan. Ketika jabatan-jabatan strategis dalam institusi pendidikan, seperti kepala sekolah atau pengawas, diperoleh melalui pembayaran suap atau bentuk korupsi lainnya, proses seleksi yang seharusnya berdasarkan kompetensi dan kualifikasi menjadi terdistorsi. Hal ini tidak hanya merugikan calon yang lebih berkualitas tetapi juga mengakibatkan pengelolaan sekolah yang buruk dan penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Praktik semacam ini menciptakan lingkungan di mana keputusan pendidikan tidak diambil berdasarkan kebutuhan dan kepentingan siswa, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menerapkan sistem seleksi yang transparan dan akuntabel, memperkuat mekanisme pelaporan dan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta membangun budaya integritas di kalangan semua pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dapat dipulihkan dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Korupsi di dunia pendidikan tidak jauh berbeda dengan korupsi yang terjadi di dunia pemerintahan. Berdasarkan dengan pemaparan tersebut, tindakan korupsi sekecil apapun harus segera diatasi sedari dini dengan berbagai upaya.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, tidak hanya kasus korupsi saja yang merajalela tetapi, kecanggihan arus teknologi pun semakin berkembang. Banyak masyarakat di Indonesia yang dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Karena teknologi masa kini sangat berpengaruh pada kehidupan insan manusia di seluruh belahan dunia. Seluruh aktivitas dapat menggunakan teknologi, menurut (Lubis & Nasution, 2023) kemunculan internet menjadi landasan bagi perkembangan konektivitas global. Pemahaman masyarakat akan perkembangan teknologi yang pesat sangatlah penting untuk memandu masyarakat untuk melalui tantangan dan peluang yang muncul. Melalui adaptasi yang cerdas, masyarakat dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi menjadi hal yang positif, seperti yang dilakukan dalam penelitian pengembangan aplikasi *financial literacy class*. Singkatnya, tidak semua dampak kehadiran IPTEK dapat membawa sesuatu yang buruk, ketika masyarakat bijak untuk menggunakan teknologi maka dapat membuat teknologi tersebut menciptakan kehidupan yang sejahtera. Kebaharuan tersebut sekaligus dapat membantu mengembangkan karakter peserta didik untuk menjadi insan yang berkualitas dan bertanggung jawab, yang mana sesuai dengan penelitian menurut Sultoni, dkk (2020) yang memaparkan bahwa pengembangan karakter siswa akan lebih efektif jika didukung oleh kerjasama yang solid antara orangtua, sekolah, dan masyarakat. Ketiga elemen ini perlu saling berkolaborasi dan terlibat secara aktif dalam proses pendidikan, menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung bagi pertumbuhan karakter siswa. Dengan pendekatan terpadu ini, nilai-nilai positif dapat ditanamkan secara konsisten, sehingga membentuk siswa menjadi individu yang berkarakter kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

3.3. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil melalui artikel penelitian ini adalah, sebagai masyarakat yang hidup di zaman serba maju karena globalisasi yang kian pesat, dituntut untuk mandiri dan bijak dalam menghadapi perkembangan globalisasi. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah dengan tidak menyalahgunakan internet dengan sembrono. Kemajuan internet di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu pemecahan masalah yang terjadi, dengan adanya teknologi yang kian canggih maka masyarakat Indonesia dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti pengaplikasian *financial literacy class* yang dirancang langsung untuk lembaga pendidikan untuk mengatasi kasus korupsi di negara Indonesia. Dengan mengutamakan *design* sederhana mungkin agar pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan aplikasi literasi keuangan yang mudah digunakan, melibatkan kolaborasi pemangku kepentingan, mengevaluasi efektivitas program di sekolah, serta menyesuaikan konten bagi generasi Z dengan fokus pada dampak jangka panjang.

Daftar Rujukan

- Agus, A. (2020). Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(3), 140-154. <https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/41>
- Argadinata, H., & Gunawan, I. (2019). The Leadership of Pancasila in Education: Foundation for Strengthening Student Characters in the Industrial Revolution Era 4.0. The 4th International Conference on Education and Management (COEMA 2019), 381, 5-7. <https://doi.org/10.2991/coema-19.2019.2>
- Astuti, N. R. W., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2147295>

- Chadijah, S. (2023). Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Penerapan Metode Role Playing Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Al-Amar (JAA)*, 4(2), 161-174. <http://ojs-steialamar.org/index.php/JAA/article/view/194>
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>
- Ismail, S., Suhana, S., & Yuliati, Z. Q. (2021). Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 76-84. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.388>
- Jermias, R. R. W. (2016). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Gaji dan Upah Pada PT. Bank Sinarmas Tbk. Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 768-892. <https://doi.org/10.35794/emba.4.2.2016.13180>
- Kadi, T., & Awwaliyah, R. (2017). Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(2). <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v1i2.32>
- Lubis, N. S., & Nasution, M. I. P. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya Pada Masyarakat. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 1(12). <https://doi.org/10.3785/kohesi.v1i12.1311>
- Mutia Basri, Y. Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34-50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Nestariana, & Ria. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 28-31. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/74>
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 30-41. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.356>
- Rahmawati, R., & Sari, Y. N. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 31-39. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/76>
- Salna, I., Akhriyah, A. F., & Akhriyah, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Riset*, 1(1), 13-22. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami/article/view/2794>
- Sulton, S., Gunawan, I., & Argadinata, H. (2020). Dampak Pembelajaran Berkarakter Terhadap Penguatan Karakter Siswa Generasi Milenial. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 51-61. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/14196/5859>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Yusmiati, E. I. (2020). Bahaya Korupsi di dalam Sistem Birokrasi. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 65-73. <https://ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/96>